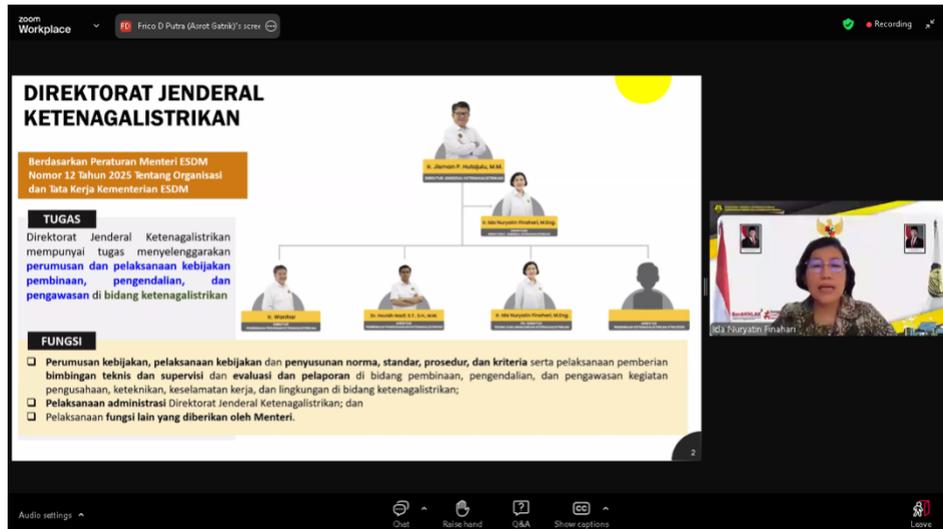
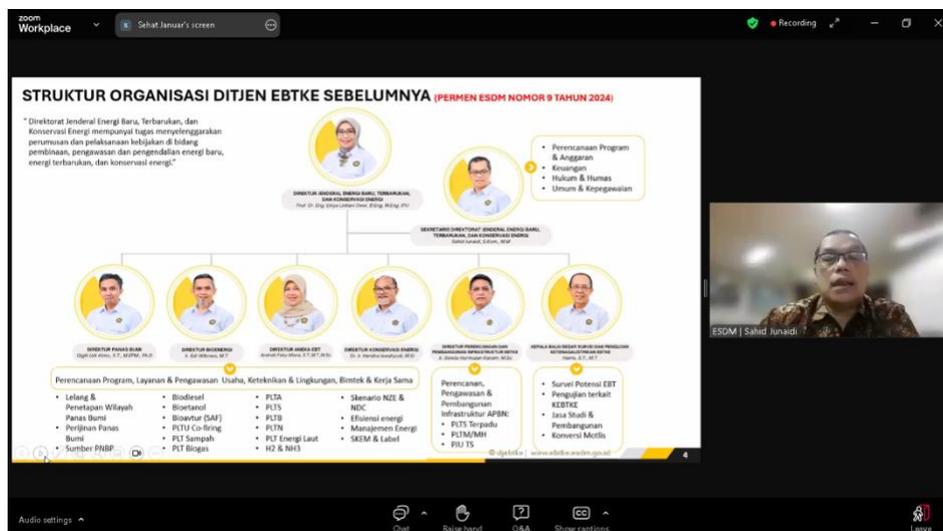


Kegiatan Bimbingan Teknik P3D (Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi) dan Pengenalan Tusi Kementerian tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Rencana Strategis

Dokumentasi:



Pemaparan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ibu Ida Nuryatin Finahari)



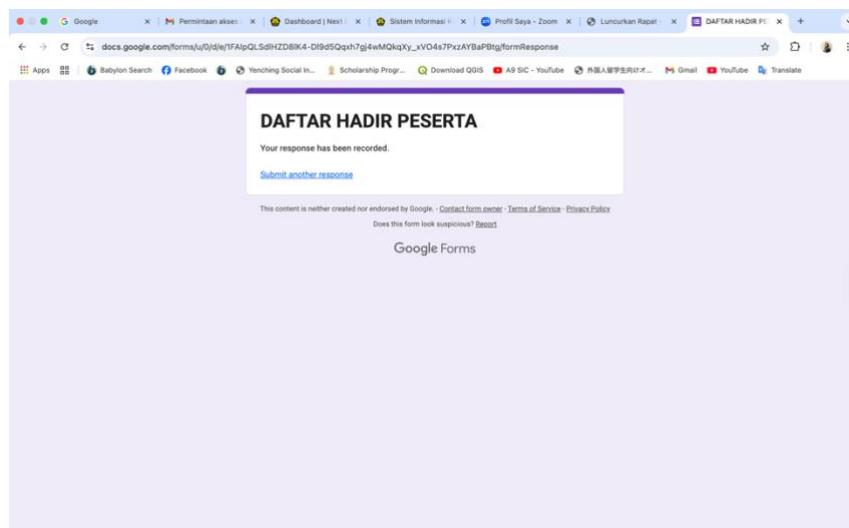
Pemaparan materi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE (Bapak Sahid Junaidi)



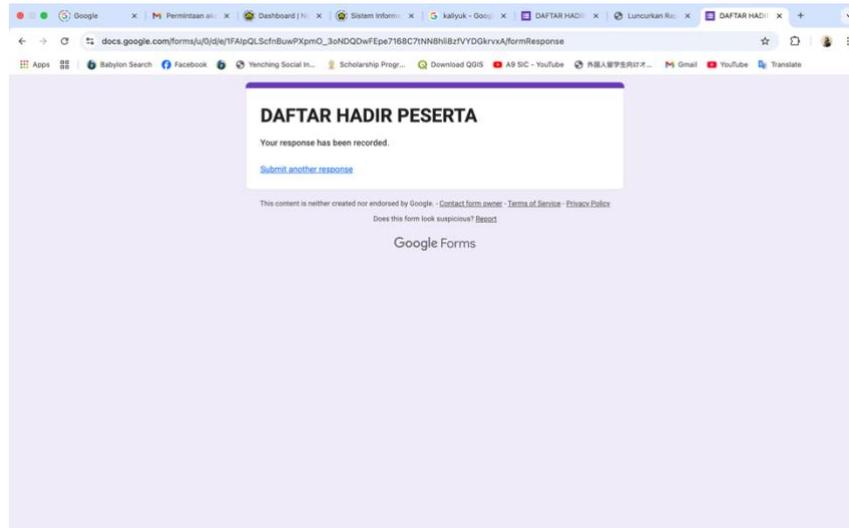
Pemaparan oleh Kepala Direktorat Jenderal Badan Geologi (Bapak Wafid)



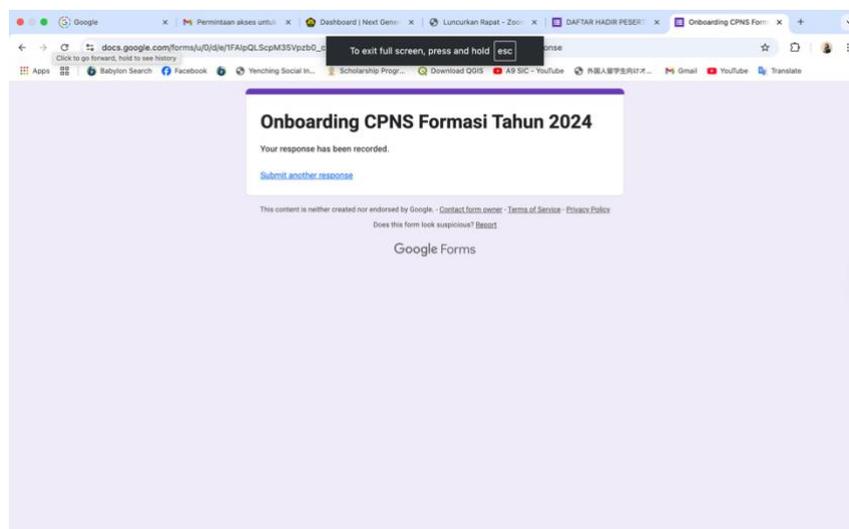
Pemaparan oleh Sekretaris Jenderal BPSDM (Bapak Wakhid Hasyim)



Bukti Presensi Pagi tanggal 11 Juni 2025



Bukti Presensi Siang Tanggal 11 Juni 2025



Bukti Pengumpulan Resume Tanggal 11 Juni 2025

Resume:

Tugas

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan

Fungsi :

- Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Terdapat 4 direktorat selain setditjen: pembinaan program tenaga kelistrikan, Pembinaan perusahaan ketenagalistrikan, Pembinaan Teknik dan lingkungan ketenagalistrikan, direktorat Pembinaan program.

Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana pada sesditjen:

1. Koordinator rencana dan laporan -> laporan internal, anggaran, internal
2. Koordinator keuangan -> keuangan, anggaran, laporan keuangan
3. Koordinator hukum -> berkaitan dgn hukum
4. Humas dan layanan informasi publik -> perss release
 Urusan rumah tangga berkaitan dengan kelengkapan RT dan pegawai masuk ke subbag umum

Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana pada Ditpro:

Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana pada Ditbinus:

- Koordinator Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
- Koordinator Pengaturan Operasi Ketenagalistrikan
- Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik
- Koordinator Harga Tenaga Listrik
- Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan

Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana pada Dittek: Berhubungan dengan standarisasi alat dan personal

- Koor standarisasi ketenagalistrikan
- Koor kelaika Teknik dan keselamatan gatrik
- Koor tenaga Teknik gatrik
- Perlindungan lingkungan gatrik → penurunan emisi GRK
- Koor usaha penunjang gatrik → izin2 usaha penunjang

Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana pada Ditsis (gatrik strategis)-> ditjen baru

- Koor gatrik hilirisasi
- Koor gatrik Kawasan ekonomi
- Koor pengembangan smartgrid, stasiun pengisian dan penyimpanan Listrik
- Koor pengembangan infrastruktur Listrik desa dan masyarakat
- Koor investasi dan TKDN gatrik

Proses bisnis Dirjen Gatrik

Utamanya adalah menyusun kebijakan dan regulasi subsektor gatrik, perencanaan, pemberian izin, pengawasan, dan monitoring evaluasi.

Renstra

- Pembagian anggaran
- Penyusunan rencana gatrik nasional
- Kerjasama

Isu strategis dirjen Ketenagalistrikan

a. Sekretaris Dirjen

- a. Menyusun renstra gatrik 2025-2029
- b. Regulasi subsector gatrik
- c. Program anggaran, SDM dan komunikasi public

b. Ditpro

- a. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
- b. Kondisi Infrastruktur Tenaga Listrik Nasional
- c. Monitoring Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- d. Kerjasama

c. Ditbinus

- a. Subsidi dan tarif Listrik

- b. Perijinan berusaha
- c. Kondisi sistem tenaga Listrik nasional
- d. Ekosistem EV: SPKLU & SPBKLU
- d. Dir Teknik Lingkungan**
 - a. Keselamatan ketenagalistrikan
 - b. Penurunan emisi CO₂ pembangkit
 - c. Keandalan sistem
- e. Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis**
 - a. Rasio elektrifikasi Rasio Desa Berlistrik
 - b. Pemenuhan Listrik Hilirisasi
 - c. Investasi dan TKDN Subsektor Ketenagalistrikan
- f. Program Infrastruktur dari APBN**
 - a. Program bantuan pasang baru Listrik (BPBL)

Indikator kinerja utama:

Indeks kemandirian ketenagalistrikan nasional

Indeks ketahanan ketenagalistrikan nasional

Indeks keselamatan ketenagalistrikan

Indeks Ketersediaan infrastruktur utk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Realisasi investasi subsector ketenagalistrikan

Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan subsector ketenagalistrikan

Jumlah kebijakan peningkatan tata Kelola ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pokok-Pokok Pengembangan EBT :

PLTA skala besar termasuk bendungan Kemen PU

PLTP di Sumatera, Jawa, Maluku dan Nusra

PLTS floating dilengkapi BESS dikembangkan massif di danau atau waduk

PLTB onshore dan offshore

PLTN di Babel 250 MW dan Kalbar 250MW

Usaha Ketenagalistrikan dibagi 2 yaitu usaha penyediaan tenaga Listrik (meliputi kepentingan umum pembangkitan gatrik transmisi, distribusi dan penjualan gatrik dan kepentingan sendiri, izinnya dikeluarkan Menteri dan besaran kapasitas ditentukan menteri) dan usaha penunjang tenaga Listrik (konsultasi, Pembangunan, standarisasi).

Hingga saat ini ada 5758 desa yang belum terlistriki PLN, tetapi 99% wilayah di Indonesia sudah terlistriki oleh PLN. Program infrastruktur dari APBN:

Program BPBL lingkup program -> instalasi Listrik rumah, pemeriksaan dan pengujian instalasi, penyambungan ke jaringan PLN dan token perdana

Transisis energi utk mendukung astacita dan keahanan energi nasional. Parameter dalam ketahanan energi : availability, accessibikity, affordability, acceptability(Ramah lingkungan).

Tugas dan Fungsi

Konservasi energi merupakan Upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energid lam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Mengenai perbedaan energi baru dan energi terbarukan terletak pada sumber energi Dimana energi baru

bersal dari teknologi baru dan atau sumber energi yang mengikuti standar emisi rendah karbon. Sedangkan energi terbarukan berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui dan berkelanjutan. Terdapat 2 direktorat baru/ pemekaran yaitu direktur energi terbarukan dan direktur energi baru.

Ditjen EBTKE juga berperan penting dalam mewujudkan komitmen Indonesia mencapai NZE tahun 2060 dengan menggunakan strategi pengembangan EBT (on-grid, off-grid, & bahan bakar nabati), Pengembangan CCS/CCUS, Pengembangan sumber energi baru, elektrifikasi, penerapan efisiensi energi dan moratorium PLTU baru serta phase down PLTU yang sudah ada.

Tantangan transisi energi

1. Infrastruktur transmisi -> perlu investasi untuk Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi
2. Regulasi -> perlu penyelesaian RUU EBET
3. Keekonomian dan pendanaan -> investasi awal pada proyek EBET cenderung tinggi
4. Kesiapan industry dalam negeri -> pengembangan industry local dalam memproduksi alat dan komponen EBET masih terbatas
5. Sosial kemasyarakatan -> resistensi dari Masyarakat thd geothermal masih tinggi

Program EBTKE dalam mendukung transisi energi adalah dengan melakukan mapping dan memanfaatkan potensi EBET dari tenaga surya, angin, air, laut, bio-energi, panas bumi, dan gasifikasi Batubara. Hingga saat ini, 0.4% Potensi EBET digunakan dalam sektor ketenagalistrikan. Selain pemanfaatan, dilakukan pula pengembangan EBET terutama ada sumber energi baru seperti nuklir, hydrogen, DME, SAF, dll.

Sebagai upaya optimalisasi potensi EBT, ditjen EBTKE memiliki beberapa program strategis bioenergy seperti penerapan kewajiban pencampuran B40– Green diesel merupakan bagian dari strategis nasional di green refinery–, percepatan bioethanol dan bioavtur.

Secara geologi, bentuk negara Indonesia sangat unik yang disebabkan oleh dinamika tektonik. Terletak pada pacific ring of fire, hal ini mendatangkan dampak positif dan negatif. Diantara dampak positifnya adalah tanah yang subur, 128 cekungan sedimen yang berpotensi sbg fosil. 29 manifestasi panas bumi, 5 jalur metallogenic dan 421 cekungan air tanah. Tetapi dampak negatifnya adalah bahaya erupsi gunung api, gempa bumi dan bahaya tsunami.

Badan Geologi merupakan salah satu unit organisasi eselon 1 yang berada dibawah dan bertanggungjawab kpd Menteri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survey geologi.

Fungsi:

- Penyusun kebijakan teknis penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan.
- Pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan
- Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria
- Pelaksanaan pemberian bimtek dan supervise
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan administrasi
- Menyiapkan usulan wilayah tambang untuk pelelangan
- Menyiapkan neraca mineral dan batubara
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
- Perizinan air tanah

Dalam menjalankan tugas dan perannya, kepala badan geologi dibantu oleh sekjen dan menaungi 4 direktorat, 4 balai dan 1 museum. 4 direktorat tsb yaitu sumber daya mineral Batubara dan panas bumi, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, pusat air tanah dan geologi tata lingkungan, pusat survey geologi dan balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan. Di bawah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana terdapat 3 balai yaitu balai pemantauan gunung api dan mitigasi bencana Gerakan tanah Sulawesi dan Maluku, balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi, dan balai pemantauan gunung api dan mitigasi bencana Gerakan tanah Nusa Tenggara. Selain itu di bawah pusat air tanah dan geologi tata lingkungan terdapat balai konservasi air tanah. Kantor Badan Geologi ada di Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Manado dan Ende dan 79 bangunan pos pengamatan gunung api.

Stakeholder Badan Geologi:

KKP, BIG (walidata yang mengurus bagian peta), PU-PR, DIKTI, Industri dan usaha, kemendagri, Masyarakat, KLHK, ATR, Perhubungan, Pariwisata, Batan dan Bapeten, Bappenas, BMKG, BNPB dan Pemda, kemhan (utk alutsista), internal ESDM.

Isu pengelolaan kegeologian 2025-2029

- Ketahanan bencana geologi dan penurunan dampak perubahan iklim
 - o Modernisasi dan instalasi pemantauan kebencanaan geologi
 - o Pengembangan pos pengamatan gunung api
 - o Pemetaan Kawasan rawan bencana
 - o Rekomendasi teknis mitigasi kebencanaan geologi
 - o Potensi carbon capture and storage
- Swasembada energi & transisi energi
 - o Prospek migas dan Batubara, gambut, aspal, bitumen padat/aspal
 - o Neraca sumber daya mineral, Batubara dan panas bumi
 - o Prospek sumber daya dan Cadangan panas bumi
 - o Potensi hydrogen alami
 - o Potensi energi gelombang laut
 - o Prospek sumber daya mineral strategis dan mineral kritis
- Pembangunan berkelanjutan berbasis geologi
 - o Layanan perizinan air tanah,
 - o Konservasi air tanah
 - o Pembangunan sumur pantau air tanah
 - o Rekomendasi Kawasan bentang alam karst dan Kawasan cagar alam
 - o Rekomendasi geologi terpadu
 - o Rekomendasi penetapan warisan geologi/geoheritage
 - o Penetapan status geopark nasional
 - o Rekomendasi UNESCO Global Geopark
 - o Museum site
- Kebijakan satu peta & regulasi kegeologian
 - o Rancangan peraturan presiden ttg pengelolaan kebencanaan geologi
 - o Penataan perizinan penggunaan air tanah
 - o RUU tentang geologi

Dirjen BPSDM – Bapak Wakhid Hasyim (Sesditjen BPSDM)

Tugas:

Menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan fungsinya, BPSDM memiliki 8 satker yaitu sekretariat BPSDM, 4 pusat pengembangan SDM (Pusat pengembangan SDM Gatrik&EBTKE (KEBTKE), Pusat pengembangan SDM Migas, Pusat pengembangan SDM Minerba, Pusat Pengembangan SDM Aparatur), Direktorat AKA Migas, Politeknik Energi dan Pertambangan Badan dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Dari 8 satker yang ada, hampir setengahnya merupakan BLU, diizinkan untuk mengelola anggarannya sendiri dengan aturan-aturan tertentu.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPSDM:

1. Pendidikan vokasi
2. Pelatihan Masyarakat sektor ESDM
3. Sertifikasi kompetensi tenaga Teknik sektor ESDM
4. Pelatihan industri sektor ESDM
5. Pengembangan kompetensi ASN

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu kualitas pengembangan SDM sektor ESDM, BPSDM melakukan akreditasi terhadap Lembaga diklat yang bertujuan utk Menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan Sektor ESDM, serta membantu menekan angka kecelakaan kerja pada industri sektor ESDM akibat adanya pelatihan yang belum standar.

Latar Belakang

- a. Kebutuhan akan Tenaga Kerja Sektor ESDM yang kompeten
- b. Memastikan kurikulum yang digunakan Lembaga Diklat Sektor ESDM telah sesuai dengan standar
- c. Tingginya angka kecelakaan kerja khususnya pada Sektor ESDM
- d. Pengakuan bagi Tenaga Kerja Sektor ESDM
- e. Meningkatkan daya saing tenaga kerja indonesia dari serbuan tenaga kerja asing
- f. Memastikan Tenaga Kerja sektor ESDM yang bekerja memiliki kompetensi yang diperlukan

Lembaga Diklat sektor ESDM ini perlu melakukan akreditasi pada topik-topik atau judul program yang dilakukan/dilatih.

Pengembangan kompetensi ASN KESDM

TLCS : Technic, legal, commercial, and Softskill

Yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ASN :

- a. Pelatihan: Peningkatan kompetensi Teknik, legal, komersial, dan softskill

- b. Magang: Peningkatan kompetensi teknis melalui praktek kerja secara langsung shg menguasai keterampilan bekerja dari tempat magang yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dg bidang tugas
 - a. Magang Es.1 >> agar memahami peran masing2 eselon dan peran kita berkaitan dengan eselon lain
 - b. Magang industry >> dilakukan bagi yang sudah magang di Eselon 1,
 - c. Magang internasional >>
 - d. Magang leadership development program
- c. Diklat
 - a. Diklat PKA >> administrasi
 - b. Diklat PKN>> kepemimpinan
- d. Tugas Belajar
- e. Uji Kompetensi JF Binaan KESDM

Grand design pengembangan ASN

1. Teknis
 - a. T. Portofolio
 - b. T. Organisasi
 - c. Teknis untuk non-teknis
2. Legal
 - a. Legal Portofolio
 - b. Legal Organisasi
 - c. Legal untuk non-Legal
3. Commercial
 - a. C. Portofolio
 - b. C. Organisasi
 - c. Commercial untuk non-commercial
4. softskill

Renstra BPSDM

Peran Strategis BPSDM

- Menyusun kebijakan Pengembangan SDM sektor ESDM
- Memastikan kesiapan tenaga kerja dalam mendukung transisi energi.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi.
- Mendorong daya saing tenaga kerja sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) agar siap menghadapi perubahan industri.

Komitmen BPSDM dalam transisi energi :

Penguatan Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri energi terbarukan.

Pengembangan program sertifikasi tenaga kerja untuk memastikan standar kompetensi yang sesuai.

Kolaborasi dengan industri dan akademisi guna mempercepat adaptasi tenaga kerja terhadap teknologi baru.

Meningkatkan akses dan pemerataan pelatihan bagi tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Program Prioritas:

- Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau
- Pelaksanaan Pendidikan/pelatihan hijau
- Penguatan Pendidikan tinggi vokasi
- Sertifikasi kompetensi mahasiswa Pendidikan tinggi vokasi

- Pendidikan tinggi vokasi sektor prioritas
- Penguatan pelatoha vokasi
- Pelatihan vokasi
- Sertifikasi kompetensi

Rencana usulan target dan indikator sasaran program,

Sasaran Program:

Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung transisi energi, hilirisasi, ketahanan energidan kemandirian energi

Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM sektor ESDM yang kompeten dan berkelanjutan.

Indikator kinerja:

1. Peningkatan penguatan Pendidikan tinggi vokasi
2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
3. Tingkat produktivitas ASN KESDM mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi